



Pemerintah Kota Semarang

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan lancar. Penyusunan laporan ini merupakan wujud perencanaan komprehensif tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja, dan disusun berdasarkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, sekaligus sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang mengakomodir dari berbagai pihak termasuk aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 memberi gambaran tentang perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG



HEROE SOEKENDAR, S.Sos.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang	35
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG	61
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG	69
BAB V PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

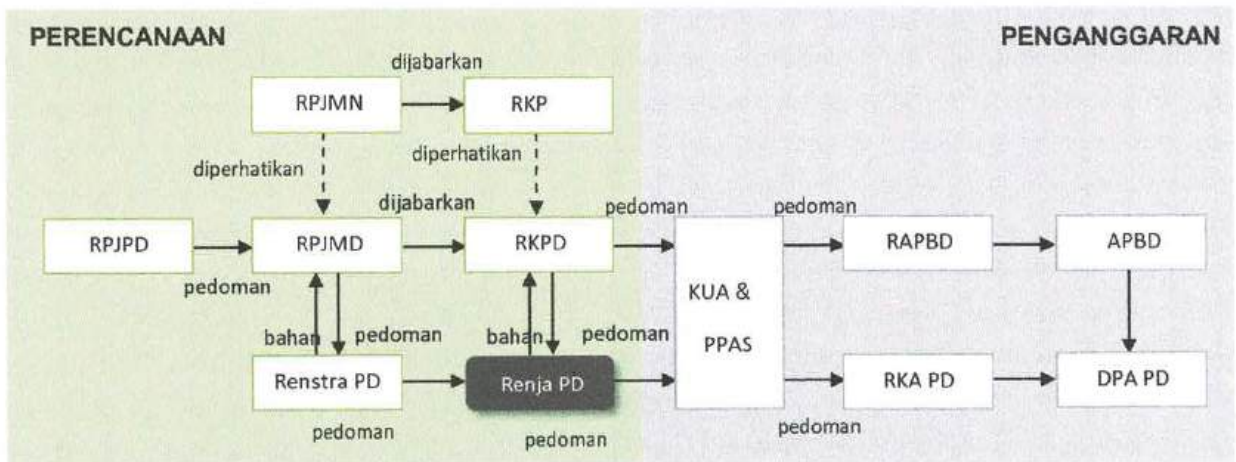
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial

- Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Semarang melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 33.774.292.665,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 26.895.135.409,00 atau sebesar 79,63%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Usman / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
			4	5	6	7	8 =	9	10 =	11 =			
1	2	3	4	5	6	7	8 =	9	10 =	11 =			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.01	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Sosial) (100%)	100,00 %	100,00 % (13,33 %)	100,00 %	100,00 % (13,12 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	46,45 %	46,45 %		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (8,57 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	48,57 %	48,57 %		
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 dokumen)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	60,00 %	60,00 %		
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	40,00 %	40,00 %		
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	40,00 %	40,00 %		
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	40,00 %	40,00 %		
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	40,00 %	40,00 %		
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 dokumen)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	60,00 %	60,00 %		
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 dokumen)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	60,00 %	60,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (10,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	50,00 %	50,00 %
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan (1 dokumen)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (12 dokumen)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 dokumen)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (7 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %

Kode Rekening	Unsan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
			4	5	6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga (12 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (35 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan (10 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (36 Exemplar)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat (1500 dos) - Jumlah penyediaan minuman dan makanan kecil/ snack kegiatan dan rapat (2000 dos) - Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat (500 pack)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (80 orang)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD (2 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
			4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (100%)	100,00 %	100,00 % (10,00 %)	100,00 %	100,00 % (10,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	40,00		
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Mebel (4 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	60,00		
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis (30 jenis)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	20,00		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor (100%)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	60,00		
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Rekening listrik, telepon, air (3 rekening)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	60,00		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (13,33 %)	100,00 %	100,00 % (13,33 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	46,66		
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (1 unit)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	60,00		
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (45 unit)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	60,00		
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Mebel yang dipelihara (10 buah)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	60,00		

Kode Rekening	Unsur / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
			4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi (4 bangunan)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00 %	60,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (1 jenis)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00 %	20,00
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (7 jenis)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00 %	20,00
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	- Dokumen Kelembagaan SKPD (100%)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00 %	20,00
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00 %	20,00
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	- Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi (66,67%)	100,00 %	-	91,50 %	71,42 % (20,00 %)	66,67 (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00 %	40,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00 %	40,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00 %	40,00
		- Fasilitasi dan pengelolaan CSR (2 kegiatan)										

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 =	9	10 =	11 =
							(7/6)		(5+7+9)	(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (66,67%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM (1 kegiatan) - Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (100%) - Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat (177 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (1 kegiatan) - Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (16 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)) (1 kegiatan)	100,00 %	-	95,00 %	100,00 %	105,00	100,00 %	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota (6 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	40,00 %	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2021)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	40,00 %	40,00
		- Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan (6 kegiatan)								
		- Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro (1 kegiatan)								
		- Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3 (1 kegiatan)								
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar/di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.03.2.01.01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar/di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debar/di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke daerah asal (10 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani (99,75%)	100,00 %	-	98,00 %	100,00 %	102,04 (98,04 %)	100,00 %	118,04 %
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (85 orang/hari)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang (150 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	- Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter (18 buah)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021		
			Target Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2.	3.	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial Operasional Rumah singgah/sheiter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00 %	120,00 %
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	- Terpenuhnya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis (6 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00 %	120,00 %
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan (50 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00 %	120,00 %

Kode Rekening	Ususan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
		- Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter (1 orang)				(100,00 %)		(20,00 %)		
		- Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia (1 paket)								
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
		- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan (100 orang)				(100,00 %)		(20,00 %)		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau (400 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
		- Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan (100%)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/dan Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhri Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga (75 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	116,07 %	116,07
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
		- Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 kegiatan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Kinerja Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Tahun 2021			Realisasi Renja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8 =	10 =	11 =	
							(7/6)	(5+7+9)	(10/4)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 kegiatan) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan (5000 orang) Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (12 kegiatan) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial (2 kegiatan) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan (5000 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	

Kode Rekening	Ususan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Perumahan (457 orang) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang (48 orang) 	100,00 %	-	100,00 %	45,00 % (45,00 %)	100,00 % (20,00 %)	65,00 %	65,00
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu (45 orang) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA (1 paket) Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA (2 kegiatan) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Capaian Program dan Akhkr Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9) / (10/4)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	- Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	- Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemirraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia (6 kegiatan) - Kegiatan Kerjasama dan Kemirraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA) (1 kegiatan) - Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA (30 orang) - Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial (69,15%)	100,00 %	-	16,45 %	24,23 %	52,71	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	- Pemberian perlindungan jaman sosial kepada anak-anak terlantar (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau (10 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk (10 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %

Kode Rekening	Usuran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Reastras/d Tahun 2022
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
			4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Menurunnya angka DTKS (16,10%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (50,89 %)	100,00	70,89 %	70,89
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang (1 kegiatan) - Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang (1 kegiatan) - Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	120,00 %	120,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan) - Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 keg) - BinteK Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan) - Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (103,59 %)	100,00	123,59 %	123,59

Kode Rekening	Ususan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
			4	5	6	7	8 = (7/5)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) (12 kegiatan) Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian (12 kegiatan) Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (12 kegiatan) Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN (12 kegiatan) Jumlah Bantuan Santunan Kematian (1.413 orang) 	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00 %	20,00 %		
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (12 kegiatan) Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN (12 kegiatan) Jumlah Bantuan Santunan Kematian (1.413 orang) 	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00 %	20,00 %		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani (100%) 	100,00 %	-	4,00 %	20,00 % (100,00 %)	500,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00 %	120,00		

Kode Rekening	Unsan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhbir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2021)		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022		
			4	5	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/ makanan siap saji (373 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids (373 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi Korban bencana (5 unit)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak) (75 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (10 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %	120,00 %

Kode Rekening	Unsur / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
			4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	2	3							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,00 %

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Sosial Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (Satu) Urusan, 6 (Enam) Program dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Program, 15 (Lima belas) Kegiatan dengan 15 (Lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan dan 67 (Enam puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan 82 (Delapan puluh dua) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
 - b) Dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Program, terdapat 3 (Tiga) Indikator yang melampaui target, 2 (Dua) Indikator memenuhi target, serta 1 (Satu) Indikator tidak memenuhi target.
 - c) Dari 15 (Lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 14 (Empat belas) Indikator yang memenuhi target, serta 1 (Satu) Indikator yang tidak memenuhi target.
 - d) Dari 82 (Enam puluh tujuh) Indikator Sub Kegiatan, terdapat 2 (Dua) Indikator yang melampaui target, 78 (Tujuh puluh delapan) Indikator yang memenuhi target, serta 2 (Dua) Indikator yang tidak memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (Satu) Urusan, 6 (Enam) Program dengan 6 (Enam) indikator program, 15 (Lima belas) kegiatan dengan 15 (Lima belas) indikator kegiatan, dan 67 (Enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan 82 (Delapan puluh dua) indikator sub kegiatan
 - b) Dari 6 (Enam) indikator kinerja program, terdapat 2 (Dua) indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 2 (Dua) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 2 (Dua) Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 15 (Lima belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 15 (Empat belas) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Semarang
Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.766.086.604	9.690.443.221	82,36	2.075.643.383
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.713.069	18.533.500	16,02	97.179.569
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.713.069	16.899.500	14,99	95.813.569
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	370.000	37,00	630.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.264.000	63,20	736.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	785.595.911	659.505.100	83,95	126.090.811
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.203.412.465	6.748.509.393	93,68	454.903.072
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	781.595.911	655.725.600	83,90	125.870.311
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	959.000	95,90	41.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.000.000	900.500	90,05	99.500
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	974.000	97,40	26.000
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1.000.000	946.000	94,60	54.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.698.050.009	1.134.963.914	66,84	563.086.095
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	982.000	98,20	18.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.791.690	48.655.800	61,75	30.135.890

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	10.336.091	60,80	6.663.909
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.490.000	30.459.500	75,23	10.030.500
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.763.780	27.315.800	62,42	16.447.980
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000	4.320.000	100	0
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.000.000	126.492.500	99,60	507.500
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.402.000	205.160.423	36,94	350.241.577
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	830.282.539	681.241.800	82,05	149.040.739
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.935.550	319.854.100	56,12	250.081.450
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.182.000	247.247.000	79,45	63.935.000
2	Pengadaan Mebel	258.753.550	72.607.100	28,06	186.146.450
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.357.500	70.171.080	69,92	30.186.420
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.357.500	70.171.080	69,92	30.186.420
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.022.100	738.906.134	57,15	554.114.966
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	705.930.000	509.040.034	72,11	196.889.966
2	Pemeliharaan Mebel	5.280.000	5.235.000	99,15	45.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.818.000	77.055.000	89,79	8.763.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	495.994.100	147.576.100	29,75	348.418.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.187.924.633	6.488.055.965	70,62	2.699.868.668
G	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.680.725	56.070.000	77,15	16.610.725
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	72.680.725	56.070.000	77,15	16.610.725
H	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9.115.243.908	6.431.985.965	70,56	2.683.257.943
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.615.347.210	3.379.624.405	93,48	235.722.805
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	343.270.080	315.343.745	91,86	27.926.335

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	513.540.080	391.121.134	76,16	122.418.946
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.906.442.290	1.942.198.680	49,72	1.964.243.610
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	736.644.248	403.698.001	54,80	332.946.247
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		40.560.000	575.000	1,42	39.985.000
I	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	40.560.000	575.000	1,42	39.985.000
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	40.560.000	575.000	1,42	39.985.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10.136.269.060	8.413.950.486	83,01	1.722.318.574
J	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.641.693.156	3.224.215.122	88,54	417.478.034
1	Penyediaan Permakanan	44.765.000	25.600.000	57,19	19.165.000
2	Penyediaan Sandang	15.000.000	15.000.000	100	-
3	Penyediaan Alat Bantu	1.270.150	1.259.950	99,20	10.200
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	15.000.000	100	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	93.400.000	92.400.000	98,93	1.000.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	71.900.000	36.415.000	50,65	35.485.000
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.025.790	8.852.235	88,29	1.173.555
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.000.000	15.000.000	100	-
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	55.000.000	34.280.000	62,33	20.720.000
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	3.106.332.216	2.788.542.937	89,77	317.789.279
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.000.000	12.150.000	81,00	2.850.000
12	Pemberian Layanan Rujukan	199.000.000	179.715.000	90,31	19.285.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
K	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.494.575.904	5.189.735.364	79,91	1.304.840.540
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	602.394.345	525.939.000	87,31	76.455.345
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	42.570.000	10.209.868	23,98	32.360.132
3	Penyediaan Permakanan	5.048.482.400	4.295.887.816	85,09	752.594.584
4	Penyediaan Sandang	19.457.096	0	0	19.457.096
5	Penyediaan Alat Bantu	590.687.818	295.585.680	50,04	295.102.138
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	11.291.345	4.608.000	40,81	6.683.345
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	98.467.900	33.975.000	34,50	64.492.900
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000	0	0	25.000.000
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	11.025.000	1.350.000	12,24	9.675.000
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.700.000	1.425.000	13,32	9.275.000
11	Pemberian Layanan Rujukan	10.700.000	0	0	10.700.000
12	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	23.800.000	20.755.000	87,21	3.045.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.314.312.508	1.185.192.737	90,18	129.119.771
L	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	105.927.930	93.641.500	88,40	12.286.430
1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	53.281.930	45.685.500	85,74	7.596.430
2	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	52.646.000	47.956.000	91,09	4.690.000
M	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.208.384.578	1.091.551.237	90,33	116.833.341
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	964.399.290	875.862.741	90,82	88.536.549
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	243.985.288	215.688.496	88,40	28.296.792
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.329.139.860	1.116.918.000	84,03	212.221.860
N	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.095.669.860	937.381.520	85,55	158.288.340
1	Penyediaan Makanan	532.535.710	452.744.060	85,02	79.791.650
2	Penyediaan Sandang	190.632.350	165.233.000	86,68	25.399.350
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.000.000	4.700.000	94,00	300.000
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	232.676.800	202.372.240	86,98	30.304.560
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	134.825.000	112.332.220	83,32	22.492.780

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
O	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	233.470.000	179.536.480	76,90	53.933.520
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100.000.000	73.820.500	73,82	26.179.500
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	133.470.000	105.715.980	79,21	27.754.020

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebesar Rp 33.774.292.665. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 26.895.135.409 dengan sisa sebesar Rp 6.879.157.256 (79,63%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3. 1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
-Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan		4,60 %	4,53 %	-	-	4,34 %	4,56 %	-	-
-Peningkatan Pelayanan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan PMKS		97 %	98 %	-	-	99,69 %	100 %	-	-
Sasaran :										
-Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)		17,32 %	16,45 %	-	-	16,15 %	24,23 %	-	-
-Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		97 %	98 %	-	-	99,69 %	100 %	-	-
	Sarana sosial seperti panti Asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi		103 panti	103 panti	-	-	119 panti	105 panti	-	-
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial		16.000 Orang	16.200 orang	-	-	513.287 orang	168.505 orang	-	-
	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		91,60 %	91,60 %	-	-	66,67 %	71,42 %	-	-

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Dinas Sosial ada 2 (dua) dengan 2 (dua) Indikator Kinerja

- 1) Tujuan **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”** memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Indikator **“Angka Kemiskinan”**, belum dapat mencapai target, dimana realisasi sebesar 4,56 % dari target sebesar 4,53 % , di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih besar dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
- 2) Tujuan **“Peningkatan Pelayanan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”** memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Indikator **“Persentase Penanganan PMKS”**, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 98 %;

b. Sasaran **“Menurunnya Angka Kemiskinan”** dan **“Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”** memiliki 5 (Lima) indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Persentase penduduk miskin (pendataan menurut indikator Pemkot Semarang)” tidak mencapai target, dimana realisasinya sebesar 24,23% dari target sebesar 16,45% (capaian sebesar 52,71%), di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih besar dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
- 2) Indikator “Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100,00%, dari target sebesar 98% (capaian sebesar 102,04%);
- 3) Indikator “Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 105 panti dari target sebesar 103 panti (capaian sebesar 101,94%).
- 4) Indikator “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 168.505 orang dari target sebesar 16.200 orang (capaian sebesar 1.040,15%).
- 5) Indikator “Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 71,42% dari target sebesar 91,60% (capaian sebesar 77,97%).

Tabel 2. 3. 2

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
- Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	-	-	16,10 %	15,80 %	16,15 %	-	15,80 %	15,50 %	
- Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	-	-	99,75 %	99,81 %	99,69 %	-	99,81 %	99,87 %	
- Menghasilkan Laporan Kinerja Yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
Sasaran :										
- Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	-	-	16,10 %	15,80 %	16,15 %	-	15,80 %	15,50 %	
- Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	-	-	99,75 %	99,81 %	99,69 %	-	99,81 %	99,87 %	
- Peningkatan Laporan Kinerja Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	-	-	66,67 %	78 %	66,67 %	-	78 %	89 %	
	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	-	-	69,15 %	69,85 %	68,47 %	-	69,85 %	70,54 %	
	Persentase Penyelesaian Manajemen Internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang sosial juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang)	17,32%	16,45%	16,10%	15,80%	16,15%	24,23%	16,10%	15,80%
2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	96%	98%	99,75%	99, 81%	99,69%	100%	99,75%	99, 81%
3	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	103 panti	103 panti	0	0	119 panti	105 panti	0	0
4	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	16.000 orang	16.200 orang	69,15%	69,85%	513.287 orang	168.505 orang	69,15%	69,85%
5	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	91,60%	91,60%	66,67%	78%	66,67%	71,42%	66,67%	78%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang di bidang sosial menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang, Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
2. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

dan persyaratan yang ditetapkan. Adapun jumlah panti/yayasan binaan di Kota Semarang sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) panti yang seluruhnya merupakan panti/yayasan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial di Kota Semarang.

wilayah yang beresiko tinggi terjadi gesekan antar kelompok masyarakat di kota Semarang.

12. Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber dan Potensi Kesejahteraan lainnya dalam rangka ikut serta dalam penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
13. Pemberian bantuan alat bantu bagi warga disabilitas yang membutuhkan sesuai surat permohonan dan atau mendapat rekomendasi dari kelurahan dan puskesmas.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal :

- a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
- c. Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
- d. Tersedianya jaringan system informasi yang ada
- e. SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan

B. Lingkungan Eksternal :

- a. Letak Kota Semarang yang strategis.
- b. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
- e. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang sosial diantaranya:

- a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya Fakir Miskin.
- b. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- d. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
- e. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSR yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- f. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
 - Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.
 - Identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

b. Peluang:

- Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
- Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
- Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal
- Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca Pandemi Covid 19.
- b. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial.
- c. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.

- d. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
- e. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel

- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah

- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Sosial Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19.070.660.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19.145.744.000	
1.06.01	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial 2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial 3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100 %	4.795.000.000	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial 2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial 3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100 %	4.396.744.000	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	4.257.260	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	4.257.260	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	487.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	487.800	-
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	355.890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	355.890	-
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	355.890	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	355.890	-
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.933.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.933.200	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	617.280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	617.280	-

Rancangan Awal RKPD 2023											
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Hasil Analisis Kebutuhan	
										Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan SKPD	100 %	8.154.360.956	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan SKPD	100 %	8.154.360.956	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mencrima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.825.768.436	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mencrima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.825.768.436	-
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	324.643.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	324.643.200	-
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	263.980	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	263.980	-
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	12 laporan	3.167.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	12 laporan	3.167.760	-
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	263.980	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	263.980	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 %	628.572.522	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 %	628.572.522	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.600.000	-
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.000.000	-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.727.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.727.000	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.369.712	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.369.712	-
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 dokumen	5.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 dokumen	5.760.000	-
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 laporan	99.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 laporan	99.000.000	-
1.06.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	252.075.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 laporan	99.000.000	-
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	215.040.810	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	215.040.810	-

No	Rancangan Awal RRPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	226.286.513	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	226.286.513	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	197.073.443	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.825.768.436	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	29.213.070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	29.213.070	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	129.782.784	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	129.782.784	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	129.782.784	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	129.782.784	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset SKPD	100 %	1.421.131.531	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset SKPD	100 %	1.421.131.531	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.313.180	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	46 unit	610.978.814	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	46 unit	610.978.814	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.636.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.636.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	491.336.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	491.336.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	173.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	173.450.000	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	101.417.537	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	101.417.537	
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan SKPD	100 %	150.818.400	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan SKPD	100 %	150.818.400	
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	150.818.400	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	150.818.400	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100 %	7.197.369.600	Program Pemberdayaan Sosial		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100 %	7.197.369.600	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terkolahnya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	117.666.700	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terkolahnya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	117.666.700	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	117.666.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	117.666.700	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100 %	7.079.702.900	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100 %	7.079.702.900	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	260 orang	5.121.772.620	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	260 orang	5.121.772.620	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	16 orang	341.711.228	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	16 orang	341.711.228	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	303.462.910	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	303.462.910	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	452.534.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	452.534.800	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 sertifikat	860.221.342	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 sertifikat	860.221.342	
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Pemerin Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100 %	54.023.060	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Pemerin Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100 %	54.023.060	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Keberaksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	54.023.060	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Keberaksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	54.023.060	

Rancangan Awal RKPD 2023										Hasil Analisis Kebutuhan		
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	1.702.720	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	1.702.720	-	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	391.424.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	391.424.000	-	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.000.000	-	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	76.040.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	76.040.000	-	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	77.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	77.000.000	-	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	4.083.678.470	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	4.083.678.470		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	494.340.800	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	494.340.800	-	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50.850.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50.850.000	-	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	2.552.309.450	Penyediaan Perumahan	Kota Semarang	Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	2.552.309.450	-	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menertima pakaian dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	20.315.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menertima pakaian dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	20.315.000	-	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	133.284.400	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	133.284.400	-	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	155.220.100	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	155.220.100	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting			
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.06.04.2.02.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0 orang	129.851.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60 orang	129.851.000	-
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membantu Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	30 orang	52.899.920	Fasilitasi Pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membantu Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	30 orang	52.899.920	-
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 orang	55.517.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 orang	55.517.000	-
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	40 orang	16.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	40 orang	16.500.000	-
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40 orang	16.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40 orang	16.500.000	-
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan	100 orang	31.900.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan	100 orang	31.900.000	-
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dekumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	4 dokumen	374.190.800	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dekumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	4 dokumen	374.190.800	-
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Cakupan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang memperoleh bantuan Sosial	100 %	4.743.785.480	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Cakupan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang memperoleh bantuan Sosial	100 %	4.743.785.480	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	220.809.710	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	220.809.710	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	151.912.400	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	151.912.400	-
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	35.209.210	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	35.209.210	-
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.688.100	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.688.100	-

No	Rencana Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting			
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	4.522.975.770	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	4.522.975.770	-
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	499.115.790	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	499.115.790	-
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	600.053.180	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	600.053.180	-
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000 keluarga	3.188.446.800	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000 keluarga	3.188.446.800	-
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50 orang	235.360.000	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50 orang	235.360.000	-
1.06.06	Program Penanganan Bencana		Persentase Pemertlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100 %	1.097.748.400	Program Penanganan Bencana		Persentase Pemertlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100 %	1.097.748.400	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100 %	612.885.400	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100 %	612.885.400	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punguisian)	373 orang	224.700.000	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punguisian)	373 orang	224.700.000	-
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punguisian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	70.860.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punguisian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	70.860.000	-
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	44.220.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	44.220.000	-
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	66.050.000	Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	66.050.000	-
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	207.055.400	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	207.055.400	-

No	Rencana Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	484.863.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	484.863.000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	247.965.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	247.965.000	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	236.898.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	236.898.000	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Sosial Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Sosial Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Sosial Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Semarang

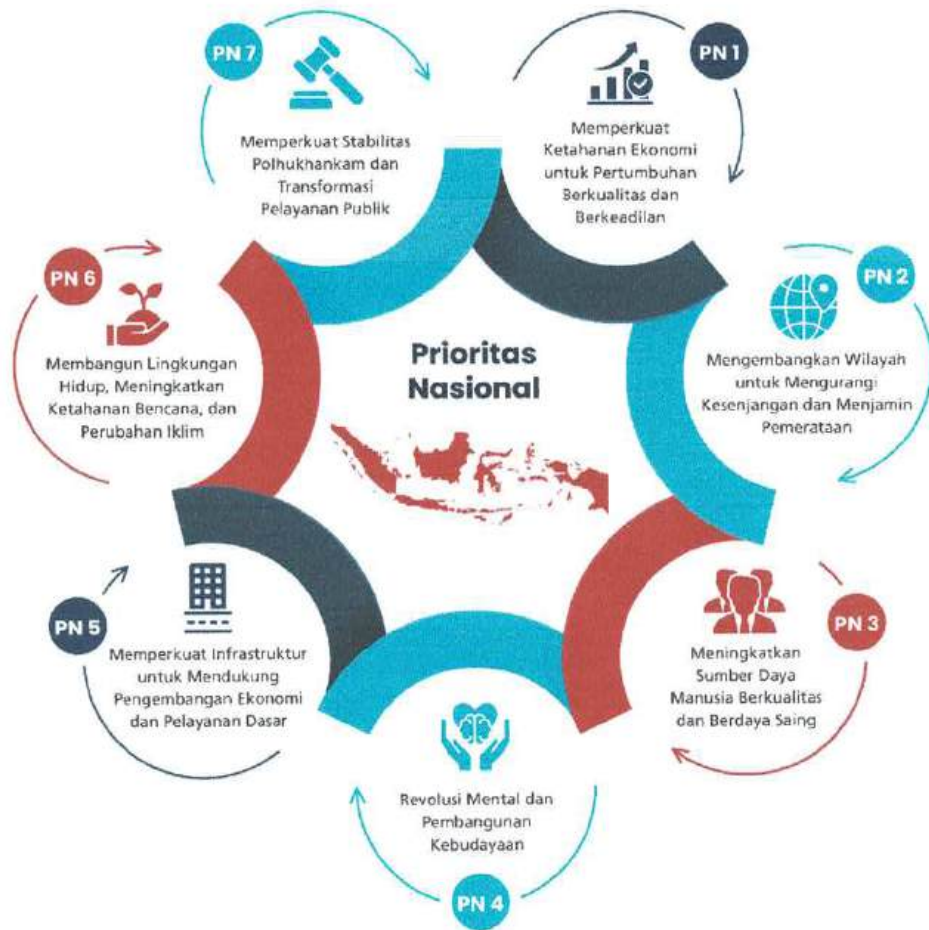
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi tentang Disabilitas	Jl. Sendangguwo Raya No. 56 RT. 13 RW 02 Sendangguwo Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	45 orang	Akan dilaksanakan Di Tahun 2023 dengan Prioritas lokasi di Kecamatan Tembalang
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rebana	Kelurahan Gondoriyo		2 set	Selama ini Dinas Sosial tidak pernah memberikan alat bantu berupa alat kesenian kepada masyarakat, saran agar diusulkan ke Sekda (Kewenangan Bagian Kesra Setda Kota Semarang)
3	Bantuan alat bantu dengar untuk disabilitas	Disabilitas Kelurahan Wonosari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	3 paket	Harap mengajukan permohonan ke dinsos dilampiri fotocopy KK, KTP, DPPS yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga miskin dan membutuhkan alat bantu dan akan di assessment Dinas Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan

prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;

- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Sosial juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

- a. “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat”
(Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin)
- b. “Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”
(Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)
- c. “Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
(Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

- a. Menurunnya angka kemiskinan
- b. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya angka DTKS
- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
- Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi
- Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial
- Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	- Persentase Penduduk Miskin	%	15,80
2. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,81
3. Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas	- Persentase penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100,00
SASARAN :			
1. Menurunnya angka kemiskinan	- Menurunnya angka DTKS	%	15,80
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,81
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00
	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00
	- Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	78,00
	- Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	69,85
	- Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Sosial Kota Semarang bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (3 indikator) dan indikator sasaran (7 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Persentase Penduduk Miskin”** dan **“Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani”** dan indikator sasaran **“Menurunnya Angka DTKS”** dan **“Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 (Enam) program, yang terdiri dari 1 (Satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (Lima) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 (Enam belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 9 (Sembilan) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 78 (Tujuh puluh delapan) sub kegiatan, yang terdiri dari 32 (Tiga puluh dua) sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 46 (Empat puluh enam) kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 48.040.553.000,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 12.751.665.000,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 35.288.888.000,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100 %	48.040.553.000			100 %	48.598.497.000
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial		100 %	12.751.665.000	APBD Kota Semarang		100 %	13.169.049.000
		5. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial		100%					
		6. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial		100%					
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD		100%	9.001.000	APBD Kota Semarang		100%	57.000.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	2.001.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	50.000.000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.500.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN								
	BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	1.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.500.000
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Semarang	12 laporan	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	1.000.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100%	9.671.712.000	APBD Kota Semarang	100%	9.977.887.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD		100%	9.671.712.000	APBD Kota Semarang	100%	9.977.887.000
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	49 orang/bulan	8.807.957.000	APBD Kota Semarang	100%	9.028.156.000
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dokumen	859.755.000	APBD Kota Semarang	100%	945.731.000
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	1.000.000	APBD Kota Semarang	1 laporan	1.000.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 laporan	1.000.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	1.000.000
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD		100%	1.217.140.000	APBD Kota Semarang	100%	1.345.434.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	5.700.000	APBD Kota Semarang	7 jenis	5.900.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	500.000.000	APBD Kota Semarang	25 jenis	500.000.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	30.000.000	APBD Kota Semarang	12 jenis	30.000.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	25.000.000	APBD Kota Semarang	50 jenis	60.500.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	15.000.000	APBD Kota Semarang	15 jenis	25.000.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Semarang	50 dokumen	5.940.000	APBD Kota Semarang	36 exemplar	6.534.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	11 laporan	137.500.000	APBD Kota Semarang	3.500 dos dan 500 pack	147.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	6 laporan	250.000.000	APBD Kota Semarang	100 orang 350.000.000
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 dokumen	248.000.000	APBD Kota Semarang	2 jenis 220.000.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	458.212.000	APBD Kota Semarang	100% 330.520.000
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	4 unit	100.000.000	APBD Kota Semarang	5 jenis 200.000.000
1.06.01.2.07.10	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	5 unit	358.212.000	APBD Kota Semarang	13 jenis 130.520.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor		100%	200.000.000	APBD Kota Semarang	100% 200.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	200.000.000	APBD Kota Semarang	3 rekening 200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD		100%	1.166.600.000	APBD Kota Semarang	100%	1.204.208.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Semarang	1 unit	39.950.000	APBD Kota Semarang	1 unit	39.950.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	46 unit	769.370.000	APBD Kota Semarang	47 unit	804.250.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	10 unit	5.280.000	APBD Kota Semarang	10 buah	5.808.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	7 unit	300.000.000	APBD Kota Semarang	1 jenis	300.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	5 unit	30.000.000	APBD Kota Semarang	1 jenis	30.000.000
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	5 unit	22.000.000	APBD Kota Semarang	7 jenis	24.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD		100%	29.000.000	APBD Kota Semarang	100%	54.000.000
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	1 dokumen	29.000.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	54.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi		100%	9.725.000.000	APBD Kota Semarang	100%	8.925.000.000
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial		100%	305.000.000	APBD Kota Semarang	100%	325.000.000
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	3 dokumen	305.000.000	APBD Kota Semarang	3 kegiatan	325.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi		78%	9.420.000.000	APBD Kota Semarang	100%	8.600.000.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	260 orang	6.650.000.000	APBD Kota Semarang	177 orang	5.156.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	16 orang	60.000.000	APBD Kota Semarang	16 orang	353.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 keluarga	360.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 kegiatan	400.000.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 lembaga	1.050.000.000	APBD Kota Semarang	-	6 kegiatan	1.100.000.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	9 sertifikat	1.300.000.000	APBD Kota Semarang	-	9 kegiatan	1.591.000.000
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani		100 %	40.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	40.000.000
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani		100%	40.000.000	APBD Kota Semarang		100%	40.000.000
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	13 orang	40.000.000	APBD Kota Semarang	-	13 orang	40.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani		99,81 %	18.528.888.000	APBD Kota Semarang	100 %	18.735.158.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	4.316.193.000	APBD Kota Semarang	100%	3.715.483.000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	85 orang	1.396.127.000	APBD Kota Semarang	70 orang/hari	1.149.753.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	150 orang	75.000.000	APBD Kota Semarang	150 orang	75.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 orang	71.897.000	APBD Kota Semarang	-	-
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	30 orang	85.500.000	APBD Kota Semarang	100 orang	85.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	250 orang	450.350.000	APBD Kota Semarang	265 orang	450.350.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	7 orang	334.000.000	APBD Kota Semarang	8 kegiatan	55.000.000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	15.884.000	APBD Kota Semarang	50 orang	15.900.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	130 orang	98.300.000	APBD Kota Semarang	130 orang	101.500.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	50.000.000	APBD Kota Semarang	100 orang	50.000.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	1.555.535.000	APBD Kota Semarang	500 orang	1.548.880.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN							
	BIDANG SOSIAL							
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	50 orang	92.400.000	-	75 orang	92.400.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 orang	91.200.000	-	100 orang	91.200.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pantli Sosial		100%	14.212.695.000		100%	15.019.675.000
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	205.500.000	-	100%	206.050.000
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 orang	54.000.000	-	100 orang	55.000.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5.000 orang	10.605.875.000	-	5.000 orang	10.605.875.000
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 orang	23.548.000	-	48 orang	25.897.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	12.420.000	APBD Kota Semarang	1 paket	13.662.000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	135 orang	90.000.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan	100.000.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	60 orang	55.000.000	APBD Kota Semarang	1 kegiatan	65.000.000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	30 orang	55.000.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan	60.500.000
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	72.604.000	APBD Kota Semarang	12 kegiatan	74.604.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 orang	12.000.000	-	12 kegiatan	14.000.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 orang	12.000.000	-	12 kegiatan	14.000.000
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	27.500.000	-	12 kegiatan	30.250.000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 dokumen	2.987.248.000	-	5 kegiatan	3.754.837.000
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			69,85 %	6.115.000.000		100 %	6.794.290.000
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			100%	80.000.000		100%	108.786.000
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	25.000.000	-	10 orang	35.786.000
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	25.000.000	-	10 orang	35.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	30.000.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan 38.000.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS		15,50%	6.035.000.000	APBD Kota Semarang	15,50% 6.665.504.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Semarang	180.000 orang	1.055.000.000	APBD Kota Semarang	3 kegiatan 1.275.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1.500 keluarga	1.503.000.000	APBD Kota Semarang	6 kegiatan 1.783.504.000
1.06.04.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50.000 keluarga	3.427.000.000	APBD Kota Semarang	48 kegiatan 3.577.000.000
1.06.04.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 orang	50.000.000	APBD Kota Semarang	12 kegiatan 50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani		100 %	880.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	935.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	630.000.000	APBD Kota Semarang	100%	665.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	373 orang	315.000.000	APBD Kota Semarang	373 orang	330.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	373 orang	150.000.000	APBD Kota Semarang	373 orang	150.000.000
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 unit	25.000.000	APBD Kota Semarang	5 unit	25.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	75 orang	30.000.000	APBD Kota Semarang	75 orang	30.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN						
	BIDANG SOSIAL						
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	11 orang	110.000.000	APBD Kota Semarang	12 kegiatan 130.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota		100%	250.000.000	APBD Kota Semarang	100% 270.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	2 kampung	50.000.000	APBD Kota Semarang	1 kegiatan 50.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	51 orang	200.000.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan 220.000.000

BAB V **PENUTUP**

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Semarang, Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG



HEROE SOEKENDAR, S.Sos.